PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SYAMSU RIJAL**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**
3. NHK : **896740**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 5.323.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/228 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.731.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 281.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 192.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/72 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 217.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/180 m2 di KAB / KOTA BONE, Rp. 2.002.500.000
6. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 153.500.000
7. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 102.500.000
8. Tanah Seluas 131 m2 di KAB / KOTA BONE, Rp. 321.000.000
9. Tanah Seluas 4.650 m2 di KAB / KOTA BONE, Rp. 286.000.000
10. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA BONE, Rp. 36.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 87.500.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 1S7JUPITER MX 135 CC Tahun 2008, HASIL

SENDIRI Rp. 2.500.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**58.280.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**16.994.383**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**5.486.274.383**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**704.055.332**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**4.782.219.051**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.